

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

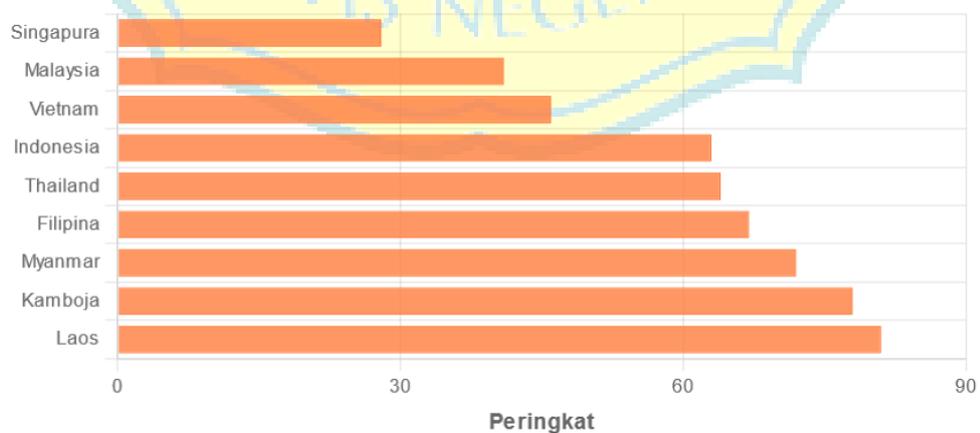
Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti pertumbuhan populasi, perubahan iklim, dan ketidakstabilan ekonomi terutama di negara-negara berkembang (Farsund et al., 2015) . Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), ketahanan pangan terjadi ketika semua orang, pada setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi yang memadai terhadap pangan yang aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari, demi menjalani kehidupan yang sehat dan aktif. Definisi ini mencakup empat elemen penting: Kecukupan ketersediaan bahan pangan, Stabilitas ketersediaan bahan pangan, Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap bahan pangan dan kualitas atau keamanan bahan pangan yang digunakan.

Secara ekonomi, ketahanan pangan yang baik dapat menjaga stabilitas harga pangan, yang pada akhirnya sangat penting untuk mengendalikan inflasi (Naylor & Falcon, 2010). Sebab ketidakstabilan harga pangan dapat memicu inflasi yang berpengaruh negatif pada daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan yang mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan pangan. Selain itu, ketahanan pangan berkontribusi pada produktivitas tenaga kerja karena akses yang cukup terhadap pangan berkualitas meningkatkan kesehatan, kapasitas kerja, dan produktivitas masyarakat (Burchi & De Muro, 2012).

Ketahanan pangan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial. Ketika akses terhadap pangan terjamin, risiko permasalahan seperti kemiskinan, kelaparan, dan malnutrisi dapat diminimalkan. Sebaliknya, ketidakpastian dalam ketersediaan pangan berpotensi memicu ketegangan sosial serta mengganggu stabilitas politik. Oleh karena itu, memastikan ketahanan pangan tidak hanya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendukung terciptanya kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Ketahanan pangan menjadi isu global yang semakin mengemuka, terutama di kawasan Asia Tenggara. Krisis pangan yang terjadi akibat perubahan iklim, pandemi dan ketidakstabilan ekonomi telah memperlihatkan pentingnya perumusan kebijakan yang efektif untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan (Kumareswaran & Jayasinghe, 2022). Negara ASEAN sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi pesat mengalami tantangan yang beragam terkait dengan ketahanan pangan, dimana inflasi pangan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi ketersediaan pangan di wilayah ini (FAO, 2021).

Gambar 1.1 Data Ketahanan Pangan di Negara Asean
Sumber : Economist Intelligence Unit (EIU)



Global Food Security Index (GFSI) yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU) memberikan gambaran mengenai tingkat ketahanan pangan di berbagai negara di kawasan ASEAN. Indeks ini menjadi acuan penting dalam menilai sejauh mana negara-negara mampu memastikan ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas dan kualitas pangan bagi penduduknya. Dalam laporan tersebut, terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara negara-negara ASEAN dalam hal ketahanan pangan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti infrastruktur, kebijakan pangan, serta kondisi ekonomi dan sosial .

Singapura menempati peringkat tertinggi di antara negara-negara ASEAN, yaitu peringkat ke-28 secara global. Posisi ini menunjukkan bahwa Singapura memiliki tingkat ketahanan pangan yang sangat baik. Negara ini dikenal dengan infrastruktur pangan yang efisien dan kebijakan perdagangan yang mendukung, meskipun sumber daya alam yang terbatas untuk produksi pangan. Letak geografis Singapura yang strategis sebagai pusat perdagangan global juga menjadi salah satu faktor utama yang mempermudah akses terhadap pasokan pangan berkualitas dari berbagai negara, sehingga menciptakan sistem ketahanan pangan yang stabil.

Malaysia menempati posisi kedua di kawasan ASEAN dan berada di peringkat ke-41 secara global. Negara ini telah lama dikenal memiliki sistem ketahanan pangan yang kuat, didukung oleh produksi pangan yang memadai, infrastruktur pertanian yang baik, serta kebijakan yang menunjang distribusi pangan. Sementara itu, Vietnam menunjukkan kemajuan dengan menempati peringkat ke-46. Peningkatan signifikan dalam produksi pangan dalam beberapa

tahun terakhir menjadi bukti keberhasilan negara tersebut, yang didorong oleh kebijakan pertanian progresif serta reformasi ekonomi.

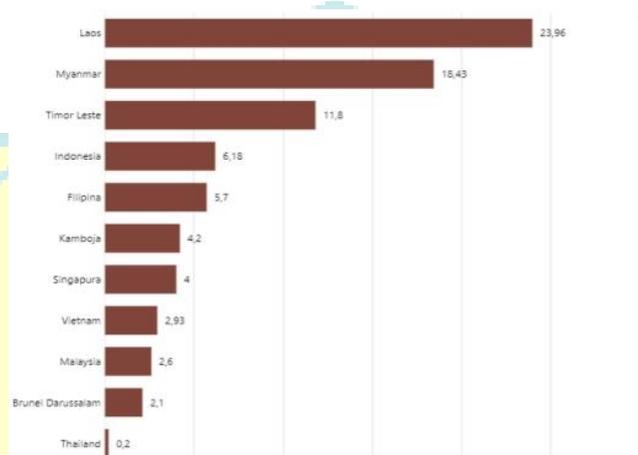
Indonesia berada di peringkat ke-63 dalam GFSI 2022. Meskipun berada di posisi menengah, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan ketahanan pangan secara merata di seluruh wilayah yang luas dan beragam. Salah satu tantangan utama Indonesia adalah distribusi pangan yang merata, terutama karena letak geografisnya yang merupakan negara kepulauan. Masalah infrastruktur dan perbedaan dalam produktivitas antar wilayah juga turut memengaruhi kemampuan negara dalam mencapai ketahanan pangan yang lebih baik.

Thailand menempati peringkat ke-64, disusul oleh Filipina di peringkat ke-67, Myanmar di peringkat ke-72, Kamboja di peringkat ke-78, dan Laos di peringkat ke-81. Negara-negara tersebut menghadapi tantangan lebih besar dalam mewujudkan ketahanan pangan, terutama dalam aspek aksesibilitas serta daya beli masyarakat terhadap pangan berkualitas. Perkembangan infrastruktur yang masih terbatas serta ketimpangan ekonomi menjadi faktor utama yang menghambat stabilitas ketahanan pangan di kawasan ini.

Ketahanan pangan sering kali menghadapi ancaman akibat inflasi pangan, yaitu kenaikan harga bahan makanan secara berkelanjutan. Berbagai faktor dapat memicu inflasi pangan, termasuk gangguan rantai pasokan, perubahan iklim, serta fluktuasi permintaan dan penawaran di pasar. Lonjakan harga kebutuhan pokok yang terjadi akibat inflasi ini secara langsung berdampak pada daya beli masyarakat. Pengendalian pangan sangat bergantung pada stabilitas harga,

ketersediaan hasil produksi, serta distribusinya di pasar. Oleh karena itu, memastikan pasokan pangan yang cukup, baik dari produksi dalam negeri maupun impor, menjadi langkah penting dalam menjaga kestabilan harga pangan.

Gambar 1.2 Tingkat Inflasi Makanan di Negara ASEAN
Sumber : Katadata.com



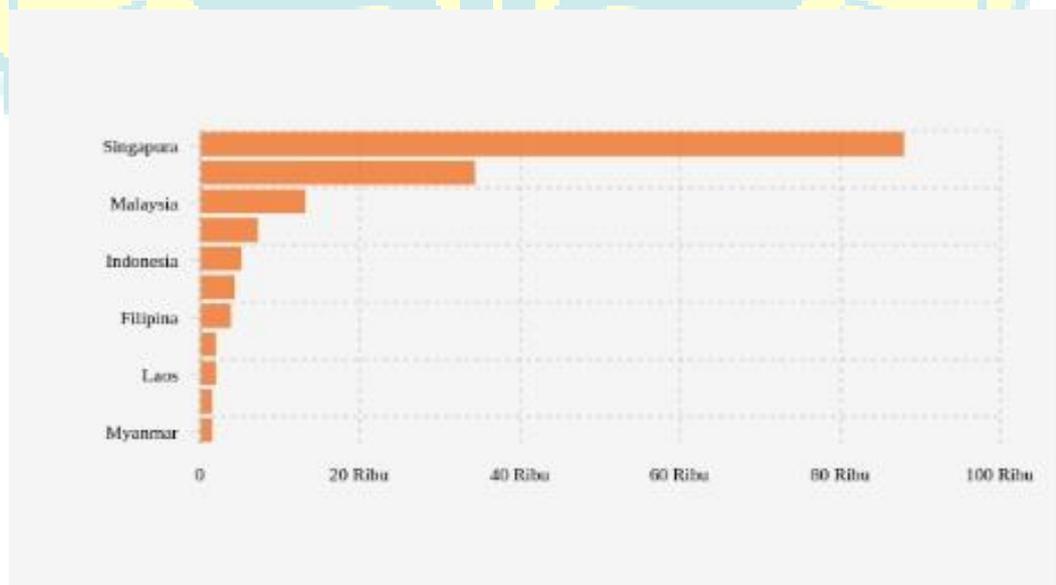
Inflasi pangan di Indonesia menjadi perhatian penting, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya (Toromade et al., 2024). Berdasarkan data terbaru pada tahun 2023, Indonesia memiliki tingkat inflasi makanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelas negara ASEAN lainnya, yang berkisar antara 0,2% hingga 5,7%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengakses pangan dengan harga terjangkau.

Tiga negara ASEAN—Laos, Myanmar, dan Timor Leste—mencatat tingkat inflasi pangan yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Kenaikan harga pangan yang signifikan di Indonesia dan negara-negara lainnya membawa dampak besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Inflasi pangan yang tinggi dapat

menurunkan daya beli, sehingga menyulitkan mereka dalam memenuhi kebutuhan gizi yang layak. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat serta meningkatkan angka malnutrisi.

Pendapatan per kapita juga memainkan peran krusial dalam menentukan ketahanan pangan suatu negara. Masyarakat dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi memiliki kemampuan untuk mengakses pangan yang lebih berkualitas dan bergizi (Drewnowski & Darmon, 2005). Peningkatan pendapatan memungkinkan individu untuk memilih berbagai jenis makanan, termasuk produk segar dan bergizi yang mendukung kesehatan. Akses yang lebih baik terhadap pangan berkualitas ini memungkinkan pemenuhan kebutuhan gizi yang penting bagi kesehatan fisik dan mental.

Gambar 1.3 Pendapatan Per Kapita Negara Asean
Sumber : Katadata.com



Tingkat pendapatan per kapita antar negara-negara ASEAN menunjukkan perbedaan yang signifikan. Negara-negara seperti Singapura dan Brunei Darussalam memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi, yang memungkinkan masyarakatnya untuk mengakses pangan berkualitas, pendidikan gizi, dan pelayanan kesehatan dengan lebih baik. Semua faktor ini berkontribusi pada ketahanan pangan yang lebih baik di negara-negara tersebut.

Negara-negara seperti Kamboja dan Myanmar memiliki pendapatan per kapita yang jauh lebih rendah. Di negara-negara dengan pendapatan per kapita rendah, masyarakat sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Keterbatasan sumber daya keuangan membatasi pilihan pangan yang tersedia, yang sering kali mengarah pada konsumsi pangan yang kurang bergizi. Hal ini dapat menimbulkan masalah kesehatan, seperti malnutrisi, yang pada gilirannya berdampak pada produktivitas dan perkembangan sosial-ekonomi. Perbedaan pendapatan ini mencerminkan ketimpangan ekonomi di kawasan ASEAN dan memengaruhi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Inflasi, pendapatan per kapita, dan belanja konsumen semuanya memengaruhi ketahanan pangan negara-negara di ASEAN, mengingat bahwa keputusan belanja individu dan kolektif dapat memengaruhi seluruh ekosistem pangan di kawasan ini. Pola belanja konsumen turut menentukan akses dan pemanfaatan pangan. Di negara-negara ASEAN, dengan perbedaan tingkat pendapatan yang signifikan, pola belanja sering kali mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan yang bergizi (Chung & Myers Jr, 1999).

Ketika daya beli meningkat, konsumen cenderung membeli lebih banyak produk berkualitas, yang membantu meningkatkan status gizi masyarakat. Sebaliknya, jika belanja konsumen terfokus pada pangan yang murah dan kurang bergizi, ini dapat menyebabkan masalah kesehatan masyarakat, seperti malnutrisi, yang pada gilirannya mengganggu ketahanan pangan.

Keempat Negara yang menjadi fokus kajian ini, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand yang mewakili variasi kondisi ekonomi dan kebijakan dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan. Pemilihan Negara-Negara ini tidak hanya didasarkan pada ketersediaan data yang memadai, tetapi juga karena Negara-Negara ini menawarkan gambaran yang representatif dalam kebijakan pangan di ASEAN. Hal ini memberikan peluang untuk analisis yang lebih komprehensif terhadap pengaruh inflasi pangan dan kebijakan ketahanan pangan di kawasan ini (World Bank, 2020).

Indonesia sebagai Negara dengan populasi terbesar di ASEAN, menghadapi tantangan serius dalam hal distribusi pangan. Wilayah geografis yang luas dan ketergantungan pada impor pangan di beberapa sektor telah memperumit manajemen ketahanan pangan di Negara ini. Inflasi pangan yang tinggi pada tahun-tahun terakhir juga menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya ketahanan pangan yang stabil di Indonesia (Asian Development Bank, 2021).

Malaysia memiliki ekonomi yang kuat di sektor agrikultur, namun tetap menghadapi tekanan inflasi pangan. Meskipun kapasitas produksi pangan negara ini relatif tinggi, fluktuasi harga komoditas global dan perubahan iklim terus

mempengaruhi stabilitas pendapatan per kapita. Kebijakan pemerintah Malaysia yang fokus pada penguatan rantai pasokan domestik menjadi langkah penting dalam mempertahankan ketahanan pangan di tengah tantangan global (FAO, 2022).

Thailand yang juga merupakan Negara agraris dengan sektor agrikultur yang kuat menghadapi tantangan yang serupa. Thailand telah menjadi salah satu eksportir pangan utama di kawasan ASEAN, tetapi inflasi pangan domestik tetap menjadi perhatian utama. Kebijakan pemerintah Thailand dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekspor dan konsumsi domestik sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan di Negara ini (OECD, 2021).

Singapura meskipun kecil dan dengan sumber daya alam yang terbatas, telah menunjukkan pendekatan yang efektif dalam mengelola ketahanan pangan. Negara ini sangat bergantung pada impor pangan namun dengan kebijakan yang efisien dan diversifikasi sumber impor, Singapura berhasil mengurangi dampak inflasi pangan global terhadap warganya. Pemerintah Singapura juga berinvestasi dalam teknologi pangan dan urban farming untuk mengurangi ketergantungan pada impor di masa depan (Ministry of Trade and Industry Singapore, 2020).

Keempat Negara ini mewakili variasi tantangan dan kebijakan yang beragam dalam menghadapi isu ketahanan pangan. Indonesia dengan masalah distribusi, Malaysia dan Thailand dengan tantangan agrikultur dan inflasi, serta Singapura dengan pendekatan impor yang efektif, semuanya memberikan gambaran tentang kompleksitas isu ini di nasional. Oleh karena itu, analisis terhadap Negara-Negara ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana

kebijakan yang berbeda diterapkan dalam konteks yang beragam (World Economic Forum, 2022).

Analisis inflasi pangan, pendapatan per kapita, dan belanja konsumen terhadap ketahanan pangan sangat penting karena ketiga faktor ini saling memengaruhi dan memiliki dampak signifikan terhadap aksesibilitas, ketersediaan, dan pemanfaatan pangan di masyarakat. Inflasi pangan, yang merujuk pada kenaikan harga pangan, secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat. Ketika harga pangan meningkat, banyak keluarga mungkin terpaksa mengurangi kualitas dan kuantitas makanan yang mereka konsumsi, yang berpotensi menyebabkan masalah kesehatan seperti malnutrisi (Brinkman et al., 2010). Oleh karena itu, analisis inflasi pangan memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi mereka.

Pendapatan per kapita berfungsi sebagai indikator utama daya beli masyarakat. Ketika pendapatan per kapita meningkat, masyarakat cenderung mengeluarkan lebih banyak uang untuk pangan, terutama makanan berkualitas tinggi yang kaya gizi (Kenny et al., 2018). Sebaliknya, jika pendapatan per kapita rendah, akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi menjadi terbatas, dan masyarakat mungkin lebih memilih makanan yang murah namun kurang bernutrisi. Dalam hal ini, memahami hubungan antara pendapatan per kapita dan pola belanja konsumen menjadi krusial untuk mengevaluasi tingkat ketahanan pangan di suatu negara. Dengan analisis yang tepat, kebijakan dapat dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan dan memperbaiki pola belanja konsumen guna mendukung ketahanan pangan.

Belanja konsumen juga memainkan peran penting dalam menentukan jenis pangan yang tersedia di pasar. Ketika konsumen menunjukkan preferensi terhadap produk tertentu, hal ini dapat mendorong produsen untuk meningkatkan pasokan dan kualitas produk tersebut. Di sisi lain, pola belanja yang tidak memperhatikan nilai gizi pangan dapat menyebabkan meningkatnya permintaan untuk produk yang kurang sehat, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, analisis belanja konsumen dalam konteks ketahanan pangan membantu dalam memahami bagaimana perilaku belanja dapat mempengaruhi ketersediaan pangan yang bergizi serta kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Analisis terhadap Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai kebijakan ketahanan pangan di kawasan ASEAN. Meskipun masing-masing negara menghadapi tantangan yang berbeda, pelajaran yang diperoleh dari kebijakan yang diterapkan dapat membantu negara-negara lain di ASEAN dalam meningkatkan ketahanan pangan mereka di masa depan. Contohnya, Indonesia menempati posisi ke-63 dalam Indeks Ketahanan Pangan Global (GFSI) 2022 dengan skor 60,2. Meskipun terdapat perbaikan, tantangan distribusi pangan, infrastruktur yang kurang memadai, dan ketergantungan pada impor pangan masih menjadi hambatan signifikan bagi aksesibilitas pangan, khususnya di daerah terpencil. Di sisi lain, Malaysia memiliki skor ketahanan pangan lebih baik di 69,9, di mana sektor pertanian, terutama kelapa sawit dan padi, memberikan kontribusi signifikan. Pemerintah Malaysia berupaya mengatasi inflasi pangan melalui program subsidi dan kontrol harga, tetapi tetap menghadapi tantangan.

Thailand, dengan skor 60,1, menunjukkan posisi yang lebih baik dibandingkan Indonesia, tetapi tetap mengalami tantangan akibat perubahan iklim dan produktivitas yang menurun dalam sektor pertanian. Inflasi pangan di Thailand meningkat terutama pada produk sayuran dan bahan pangan lainnya akibat biaya produksi yang lebih tinggi. Sementara itu, Singapura, dengan skor tertinggi di ASEAN yaitu 73,1, memiliki strategi diversifikasi sumber pangan yang kuat. Meskipun bergantung pada impor, inflasi pangan di Singapura mencapai 7,1% pada tahun 2022, dipicu oleh krisis global dan lonjakan harga energi.

Belanja Konsumen yang merupakan pengeluaran untuk mencukupi keperluan anggota rumah tangga berupa makanan dan bukan makanan menjadi salah satu kontributor terbesar dalam peningkatan perekonomian (Yulita, 2024). Tingkat konsumsi yang tinggi dianggap positif karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kondisi ini juga mengakibatkan pergeseran pola konsumsi masyarakat, dari konsumsi yang didasarkan pada kebutuhan menjadi konsumsi yang tidak terbatas. (Afifuddin, 2022)

Analisis ini menunjukkan adanya kekurangan penelitian mengenai bagaimana negara-negara ASEAN, yang menghadapi tantangan ketahanan pangan yang berbeda, dapat saling belajar dan menerapkan kebijakan yang lebih efektif. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung fokus pada satu negara atau satu aspek ketahanan pangan saja, tanpa mempertimbangkan interaksi antara inflasi pangan, pendapatan per kapita, dan pola belanja konsumen.

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penulis memilih judul "Pengaruh Inflasi Pangan, Pendapatan Per Kapita, dan Belanja Konsumen terhadap Ketahanan Pangan Negara ASEAN pada Tahun 2013-2022." Judul ini dipilih berdasarkan adanya kesenjangan penelitian mengenai interaksi antara variabel-variabel ekonomi makro tersebut dalam memengaruhi ketahanan pangan di negara-negara ASEAN. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada satu negara atau satu aspek saja, tanpa mempertimbangkan pengaruh simultan inflasi pangan, pendapatan per kapita, dan pola belanja konsumen. Oleh karena itu, melalui studi ini, penulis berusaha untuk menganalisis hubungan ketiga faktor tersebut dan bagaimana mereka berdampak pada ketahanan pangan di kawasan ASEAN, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan di Indonesia dapat terganggu oleh fluktuasi Pendapatan Per Kapita yang dapat berdampak pada penurunan taraf kemakmuran sebagian masyarakat. Inflasi pangan dapat menurunkan nilai uang secara riil yang dipegang masyarakat, sehingga berkurang kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya yang dapat berdampak pada ketahanan pangan Negara ASEAN.

2. Inflasi Pangan

Inflasi pangan di Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap inflasi umum di Indonesia, dengan persentase perubahan Pendapatan Per Kapita yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap inflasi umum di Indonesia.

3. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita yang tidak stabil dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ketika pendapatan per kapita mengalami fluktuasi, daya beli masyarakat juga terpengaruh, yang dapat mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan.

4. Belanja konsumen

Belanja konsumen di Indonesia relatif tinggi dengan komoditas pangan sebagai penyumbang terbesar konsumsi masyarakat miskin. Peningkatan Pendapatan Per Kapita akan meningkatkan garis kemiskinan yang relatif cukup tinggi yang kemudian berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara inflasi pangan terhadap ketahanan pangan Negara ASEAN pada tahun 2013-2022?

2. Apakah terdapat pengaruh antara Pendapatan Per Kapita terhadap ketahanan pangan Negara ASEAN pada tahun 2013-2022?
3. Apakah terdapat pengaruh antara belanja konsumen terhadap ketahanan pangan Negara ASEAN pada tahun 2013-2022?
4. Apakah terdapat pengaruh antara inflasi pangan, pendapatan per kapita dan belanja konsumen terhadap ketahanan pangan Negara ASEAN pada tahun 2013-2022?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian untuk mengetahui, menghitung dan menganalisis:

1. Pengaruh inflasi pangan terhadap ketahanan pangan Negara ASEAN pada tahun 2013-2022.
2. Pengaruh pendapatan per kapita berpengaruh terhadap ketahanan pangan Negara ASEAN pada tahun 2013-2022.
3. Pengaruh belanja konsumen berpengaruh terhadap ketahanan pangan Negara ASEAN pada tahun 2013-2022.
4. Pengaruh inflasi pangan, pendapatan per kapita dan belanja konsumen terhadap ketahanan pangan Negara ASEAN pada tahun 2013-2022.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Penulis

Penelitian ini bagi penulis merupakan tambahan wawasan di bidang ekonomi, yang memungkinkan penulis untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

2. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai hubungan Inflasi Pangan, Pendapatan Per Kapita dan Belanja Konsumen Terhadap Ketahanan Pangan Negara ASEAN Pada Tahun 2013-2022.

3. Pemerintah Terkait (Stakeholder)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kebijakan pembangunan pemerintah yang terutama terkait dengan Inflasi Pangan, Pendapatan Per Kapita dan Belanja Konsumen Terhadap Ketahanan Pangan Negara ASEAN Pada tahun 2013-2022.